

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Kantor Kecamatan Semparuk Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Semparuk.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Semparuk Tahun 2026 merupakan dasar dan pedoman bagi rencana kerja tahun pertama Atas Pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 menjadi bahan materi bahan musyawarah perencanaan Pembangunan kabupaten Sambas guna menyusun Dokumen Rencana kerja pemerintah Daerah RKPD tahun 2026 serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kantor kecamatan semparuk tahun 2026 dan Rancangan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2026.

Rencana kerja Kantor kecamatan Semparuk memberikan pedoman bagi unit kerja kepada pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staf di lingkungan Kantor Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas secara akuntabel dan yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya RENJA ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENJA ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Sambas, Juli 2025

CAMAT SEMPARUK

ALPIAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196709041994031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan Renja	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4. Review terhadap RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	29
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	33
3.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	47
Lampiran	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaannya itu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Semparuk sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sambas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sambas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semparuk Tahun 2025 – 2029.

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Semparuk Tahun 2026 merupakan dokumen yang

berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama RPJMD 2025 – 2029. Dokumen ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semparuk Tahun 2025 – 2029 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 - 2029.

Sesuai dengan Visi DAN Misi Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2025 – 2029” *Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Adaptif, dan Harmonisasi Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan*”.

, Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 tersebut, Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-4 yaitu *Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi*.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang berisikan penjabaran Renstra 2025 - 2029 dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2026.

Selain dari itu, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semparuk Tahun 2026 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi ditahun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Dalam proses penyusunannya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semparuk Tahun 2026 telah mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergisitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD

menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena system perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah .
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 55);
- 1.3. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

✓ MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Semparuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

✓ TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Semparuk dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2026.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Semparuk dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Semparuk untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2026. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja propinsi/kabupaten/kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistmatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Semparuk

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Semparuk tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu kepada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

- ✓ Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- ✓ Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- ✓ Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- ✓ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- ✓ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
- ✓ Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang harus disajikan adalah Tabel T-C. 29

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai saat ini tidak ada. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dan penganggaran dilakukan perubahan RKA/DPA, perubahan Renja dan perubahan Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Sambas, Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Semparuk, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Semparuk dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
- 2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
- 3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Sambas;
- 4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Semparuk Tahun 2024 dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Semparuk yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semparuk yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Semparuk, untuk lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Semparuk dapat dilihat dari table Tabel T-C. 23

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai :

- ✓ Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,
- ✓ Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- ✓ Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,
- ✓ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan
- ✓ Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

Rencana Kerja Kecamatan Semparuk berdasarkan RKPD Kabupaten Sambas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Sambas yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Semparuk. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah, dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sambas yaitu **“TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kompilasi data hasil Musrenbang kecamatan: Seluruh data hasil musrenbang kecamatan yang terhimpun pada aplikasi akan dikompilasi menjadi database hasil musrenbang. Database dimaksud selanjutnya menjadi bahan dalam Forum OPD/LPD di tingkat Kabupaten.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- ✓ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

- Pelayanan Meningkatnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di wilayah kecamatan
 - Pelayanan meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kecamatan .
 - Pelayanan Peningkatan Tata kelola pemerintahan desa Desa di wilayah kecamatan
 - Pelayanan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dan Desa.
- ✓ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
- Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- ✓ Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- ✓ Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kantor Camat Semparuk guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Peran strategis Kantor Camat Semparuk menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi birokrasi sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan mendesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan

layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan Rencana Kerja (Renja) tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan dievaluasi program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan rencana kerja tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Semparuk tahun 2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review rencana kerja oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana kerja merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja. Akselerasi pencapaian

kinerja melalui hasil revidi Rencana Kerja menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kantor Camat Semparuk.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- ✓ Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- ✓ Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- ✓ Rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun $n-2 = 2026-2 = 2024$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan : Tidak ada
Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan: Tidak ada
- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan :
Tidak ada program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ada 14 (empat belas) kegiatan yang keluarannya mencapai 100% dan program yang keluarannya belum mencapai 100 % tidak ada serta program yang keluarannya melebihi 100% juga tidak ada.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 dengan Anggaran sebesar Rp. 1.976.562.451,- (sesuai DPA SKPD awal 2023) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.373.193.935,- Belanja Barang dan Jasa Rp547.767.624 dan Belanja Modal sebesar Rp. 549.318.516,- dengan terurai dalam 5 program dan 13 kegiatan, dengan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Semparuk sebagai berikut :

- 1. Keterbatasan data dan informasi;
- 2. Belum optimalnya kemampuan sumberdaya manusia;
- 3. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- 4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Semparuk, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan

tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

SKPD Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada faktor – factor penyebab tersebut di atas maka SKPD Kecamatan Semparuk melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relative sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
- Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumberdaya manusia. Dari sisi kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari sisi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Hal ini dilatarbelakangi Pendidikan formal SDM yang berkualifikasi perencana sangat sedikit. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.
- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan system sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas akan disajikan pada table berikut di bawah ini :

Tabel tc 29

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 lembar	240 lembar	240 lembar	240 lembar	100%	240 lembar	720 lembar	60%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Orang/ bulan	1 Orang/ bulan	4 Orang/ bulan	4 Orang/ bulan	100%	4 Orang/ bulan	13 Orang/ bulan	65%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	30%
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
7	01	02	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	30 Laporan	60%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	30 Laporan	60%
7	01	03	2.01		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Unsur	8 Unsur	8 Unsur	8 Unsur	100%	8 Unsur	24 Unsur	60%
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	60%
7	01	04	2.01		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	60%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	40 Laporan	5 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	29 Laporan	73%

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	60%
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	60%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	60%
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	60%
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	60%
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	25 Laporan	-	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semparuk

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Semparuk dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan adalah : Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Semparuk.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada table berikut, dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring & evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran dan Capaian Kinerja Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	88,16	88,17	88,18	88,19	88,2	88,21	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	64% (Baik)	65% (Baik)	67% (Baik)	69 % (Baik)	70% (Baik)	71% (Baik)	

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Kecamatan Semparuk

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Semparuk tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Secara garis

besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh factor eksternal dan factor internal.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025 yaitu pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD dimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Semparuk untuk pelayanan publik adalah 88,55 dengan mutu pelayanan “Sangat Baik” bahwa indikator nilai tertinggi adalah indikator “Biaya/tarif”, sedangkan indikator nilai terendah “Kesesuaian Persyaratan”. Adapun indikator unsur unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,550
U2	Prosedur Pelayanan	3,590
U3	Kecepatan Pelayanan	3,540
U4	Kesesuaian Biaya	3,630
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,600
U6	Kompetensi Petugas	3,560
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,490
U8	Kualitas Saranan dan Prasarana	3,620
U9	Penanganan Pengaduan	3,620

Kualitas Sarana dan Prasarana Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas sebagai berikut.

- Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.
- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Disamping factor eksternal, juga terdapat beberapa factor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Keberadaan sumberdaya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang meliputi sumberdaya manusia(SDM), anggaran,sarana dan prasarana,kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi factor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas:

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

SumberDaya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segikualitas berdasarkan spesifikasi keilmuandan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal). Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas secara memadai.

2. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja.

Keterbatasan anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan.

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indicator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program – program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja 2024 SKPD Kecamatan Semparuk sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidaksesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Tabel 3 (FORM T-C.31)											
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas											
No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Semparuk	umlah Dokumen RKA perubahan yang tersedia	1 Dokumen	2.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Semparuk	umlah Dokumen RKA perubahan yang tersedia	1 Dokumen	2.400.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen DPA yang tersedia	1 Dokumen	2.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen DPA yang tersedia	1 Dokumen	2.300.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen DPA perubahan yang tersedia	1 Dokumen	2.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen DPA perubahan yang tersedia	1 Dokumen	2.300.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	2.600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	2.600.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Semparuk	Jumlah dokumen Evaluasi yang tersedia	4 Dokumen	2.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah dokumen Evaluasi yang tersedia	4 Dokumen	2.300.000,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semparuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.732.586.299,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semparuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.732.586.299,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Orang/bulan	26.128.899,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Orang/bulan	26.128.899,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi di SKPD	1 Laporan	2.200.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi di SKPD	1 Laporan	2.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Keuangan Setiap Akhir Tahun	1 Laporan	3.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Setiap Akhir Tahun	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Keuangan Setiap Akhir Tahun	1 Laporan	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Keuangan Setiap Akhir Tahun	3 Laporan	3.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Setiap Akhir Tahun	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Keuangan Setiap Akhir Tahun	3 Laporan	3.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Semparuk	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	1 Tahun	30.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semparuk	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	1 Tahun	30.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	4.400.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	4.400.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 buah	8.300.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 buah	8.300.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	30 buah	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	30 buah	30.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 item	13.200.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 item	13.200.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Eks	3.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Eks	3.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	73.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	73.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Mebel	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 buah	24.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kec. Semparuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 buah	24.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Semparuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	23.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Semparuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	23.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 lembar	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 lembar	4.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	15.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Orang/ bulan	45.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Orang/ bulan	45.000.000,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Semparuk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Semparuk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Semparuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Semparuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Semparuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Semparuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Semparuk				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Semparuk				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	7.383.376,20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	7.383.376,20	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Semparuk				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Semparuk				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	17.200.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	17.200.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Semparuk				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Semparuk				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semparuk	Jumlah kegiatan sesuai pelimpahan kewenangan yang terpenuhi	5 Laporan	22.800.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semparuk	Jumlah kegiatan sesuai pelimpahan kewenangan yang terpenuhi	5 Laporan	22.800.000,00	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Semparuk				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Semparuk				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Semparuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga	18.600.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Semparuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga	18.600.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	11.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	11.500.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Semparuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	34.500.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Semparuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	34.500.000,00	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Semparuk				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Semparuk				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	21.265.762,60	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	21.265.762,60	
	Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Semparuk	Jumlah kegiatan pembinaan dan Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	20.500.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semparuk	Jumlah kegiatan pembinaan dan Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	20.500.000,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Semparuk				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Semparuk				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 Laporan	24.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Semparuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 Laporan	24.000.000,00	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Semparuk				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Semparuk				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Semparuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5 Laporan	20.600.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Semparuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5 Laporan	20.600.000,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	kec. Semparuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Orang	21.365.762,60	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	kec. Semparuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Orang	21.365.762,60	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	12.600.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	12.600.000,00	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Semparuk				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Semparuk				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Laporan	20.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Laporan	20.000.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Laporan	10.765.762,60	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Laporan	10.765.763	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Laporan	36.936.217	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Semparuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Laporan	36.936.217	
					2.513.332.079,00						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Alamat web e-Musrenbang kecamatan: www.sippd.kab.sambas.com



Tahap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebagai berikut:

1. Susunan acara Musrenbang kecamatan

- Pendaftaran peserta
- Acara pembukaan Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pembacaan Doa kemudian pembukaan oleh Camat, Pengarahan Kepala Daerah
- Sidang Pleno I Paparan Camat, Bappeda, Perwakilan Anggota DPRD, Lainnya.
- Sidang kelompok Pembahasan pada 3 (tiga) Sidang Kelompok.

Nama kelompok sidang pada Musrenbang kecamatan:

- 1) Kelompok sidang ekonomi dan SDA
- 2) Kelompok sidang pemerintahan dan pembangunan manusia
- 3) Kelompok sidang infrastruktur dan kewilayahan

Catatan:

- Kesepakatan diambil secara musyawarah
- Tiap desa mengusulkan 5 prioritas tiap kelompok sidang
- OPD mengklasifikasi dan memverifikasi usulan desa

- BAPPEDA mendampingi kelompok sidang
- Operator mengentry hasil kelompok sidang dan prioritas kecamatan yang bersifat intas desa/usulan pembangunan untuk layanan publik.

Nama kelompok forum OPD/LPD di kabupaten:

- 1) Forum ekonomi dan SDA
 - 2) Forum kebijakan dan pemerintahan umum
 - 3) Forum pendidikan
 - 4) Forum kesehatan
 - 5) Forum infrastruktur dan kewilayahan
- Sidang Pleno II Pembacaan Hasil Sidang Kelompok
 - Penandatanganan berita acara
 - Penutup

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2026 yang akan diimplementasikan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sambas Tahun 2026.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Semparuk Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 55);

Kedudukan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsure penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Sambas, dengan visi “ **TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN**”

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance). Makna yang terkandung adalah didalam pengembangan implementasi pelayanan publik yang unggul dan memuaskan masyarakat dilandaskan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan inovasi mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan.

Profesional

Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsiptransparansimenciptakan kepercayaan timbal balik Antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabel

Makna dari akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance).

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan public setiap kebijakan public beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat, agar setiap keputusan/kebijakan public dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya. Sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan public akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan public akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

3.1.2. Kebijakan Propinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur organisasi dan tata kerja mengacu pada redefenisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumberdaya manusia di kecamatan Semparuk yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja Terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK sesuai dengan isu strategis propinsi Kalimantan Barat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Kabupaten Sambas, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Semparuk Tahun 2026, yaitu :

Tujuan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas adalah :
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan Semparuk

Adapun rumusan sasaran Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik di wilayah kecamatan.
- 2) Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelembagaan desa (Kemasyarakatan) dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
- 3) Terwujudnya Jati diri dan kepribadian yang religius, berbudaya, swadaya masyarakat dan berwawasan kebangsaan
- 4) Terwujudnya stabilitas keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan

- 5) Terwujudnya Upaya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

3.3. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2026 ditunjang dengan Belanja Operasional (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal), dalam Rencana Kerja kecamatan Semparuk tahun 2026 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasional meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **2.298.253.809,60**.

Yang terbagi ke dalam beberapa program sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

Rencana program dan kegiatan

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SEMPARUK KAB. SAMBAS
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SEMPARUK						2.298.253.809,60							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.298.253.809,60							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.298.253.809,60							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.072.253.809,60						-	0,00	
		[Meningkatkan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah]	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	100	100	100	2.072.253.809,60	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			-				-	2.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.752.460.036,65			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.711.180.036,65	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	35.280.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	81.393.772.95			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	7.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	9.873.772,95	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	12.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.600.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	44.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.400.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Akuntabi litas dan Tr ansparansi Tata Kelola Pemerintah an	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
		-	-	-	-	-	-	2.072.253.809,60	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	43.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan]	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	43.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	13.000.000,00			-	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	7.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	55.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan]	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100	100	100	100	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				250 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	45.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum]	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	100	100	100	100	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	35.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				25 Orang	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	48.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik]	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	100	100	100	100	48.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	48.000.000,00			-	Meningkatk an Akuntabi litas dan Tr ansparansi Tata Kelola Pemerintah an	-	-	0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				5 Dokumen	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Akuntabi litas dan Tr ansparansi Tata Kelola Pemerintah an	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Akuntabi litas dan Tr ansparansi Tata Kelola Pemerintah an	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Akuntabi litas dan Tr ansparansi Tata Kelola Pemerintah an	-		0,00	KECAMATAN SEMPARUK
		J U M L A H						2.298.253.809,60						0,00		

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator kinerja Kecamatan Semparuk yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kec. Semparuk dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	88,16	88,17	88,18	88,19	88,2	88,21	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	64% (Baik)	65% (Baik)	67% (Baik)	69 % (Baik)	70% (Baik)	71% (Baik)	

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program

prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sambas.

Kecamatan Semparuk telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2026 yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

BAB V. PENUTUP

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semparuk tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Semparuk. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semparuk Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Semparuk, 1 Juli 2025

CAMAT SEMPARUK

ALPIAN. S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196709041994031009